

Etnisitas Masyarakat Tionghoa di Kampung Cino Kota Padang, 1998-2022

Ayu Putri*, Salsabila Yumna al-Insyi, Wendi Fernandez & Syamsul Badri

Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This article describes the ethnicity of the people of Kampung Cino in Padang City. This research uses historical methods through data collection techniques from interviews. The results of the interviews were then supplemented with written data sources. The findings of this article explain the history of Chinese ethnicity and cultural differences that the life of ethnic Chinese in Cino Village, Padang City shows that they can blend in life without losing their identity, they still maintain their existence, especially in the economic sector. In addition, this research will also show whether there are conflicts that occur during the process of adaptation to the existence of this ethnicity.

ARTICLE HISTORY

Submitted 23 August 2022
Revised 18 September 2022
Accepted 22 September 2022

KEYWORDS

Chinese; violence; culture; fields; identity.

CITATION (APA 6th Edition)

Putri, A. al-Insyi, S. Y. Fernandez, W. Badri, S. (2022). Etnisitas Masyarakat Tionghoa di Kampung Cino Kota Padang, 1998-2022. *Local History & Heritage*. 2(2), 89-95.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

 yurifauyu@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan etnik Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari fenomena diaspora yang sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama, mereka keluar dari daratan Tiongkok disebabkan karena berbagai faktor (Alkadrie et al., 2017; Charity, 2016). Indonesia menjadi salah satu wilayah tujuan mereka termasuk Kota Padang (Erniwati, 2019). Etnik Tionghoa menjadi kaum minoritas di tengah masyarakat plural di Indonesia (Deci, 2021). Sejak masa Kolonial Belanda, etnik ini sudah dipisahkan dari tempatnya. Konflik antara etnik Tionghoa dengan masyarakat setempat lebih sering terjadi daripada masyarakat di Asia Tenggara lainnya. Hal itu meninggalkan kesan trauma bagi mereka bahkan ada yang memilih meninggalkan negara Indonesia. Sejarah kelam mewarnai perjalanan keberadaan etnik ini di Indonesia (Cahyaningtiyas, 2020).

Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia, krisis ini memunculkan berbagai tuntutan kepada pemerintah melalui demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa (Kurniawan, 2016). Demonstrasi ini pada akhirnya memunculkan berbagai ketegangan-ketegangan, kekerasan dan konflik baik individu, kelompok, etnik maupun agama. Aksi demonstrasi yang berujung pada aksi-aksi anarkis terutama pada etnik Tionghoa yang menjadi korban, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Padang. Alasan etnik Tionghoa yang menjadi sasaran dari kemarahan para demonstran adalah adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara etnik Tionghoa dengan masyarakat pribumi (Lutfiana & Savitri, 2021). Mereka sebagai warga pendatang bisa bertahan/ berhasil di daerah orang, sedangkan warga pribumi sendiri mengalami hal yang sebaliknya, bahkan mereka kehilangan pekerjaan dan tidak bisa menghidupi keluarga.

Aksi kekerasan yang dilakukan terhadap etnik Tionghoa di Padang berbeda dengan beberapa daerah lainnya, seperti di Jakarta dan Medan yang memakan korban jiwa. Di Padang aksi ini berupa perampasan terhadap toko-toko milik etnik Tionghoa yang ada di Kawasan Pondok Cina, perusakan gedung-gedung serta tindakan intimidasi. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun tetap menimbulkan trauma yang mendalam bagi mereka sebagai korban (Deci, 2021).

Pada dasawarsa sekarang ini di Kota Padang, etnik Tionghoa menjalani kehidupan tanpa diwarnai dengan konflik terbuka. Meskipun secara intensitas mereka termasuk kalangan minoritas, tetapi mereka bisa melebur dengan masyarakat mayoritas tanpa menghilangkan jati diri mereka. Proses adaptasi yang mereka lalui memiliki keunikan



tersendiri, tergantung dari kearifan lokal tempat tujuan mereka yang bisa memberikan dampak yang berbeda dalam pembentukan identitas wilayah tempat tinggal mereka. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa etnikistas Tionghoa bisa mempertahankan eksistensinya dalam berbagai bidang terutama pada bidang perekonomian (Alfirdaus et al., [2016](#)).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan berdasarkan penelitian sejarah (Kuntowijoyo, [2021](#)). Metode penelitian ini menggunakan data-data artikel dan jurnal sebagai sumber utama penulisan yang dapat menghasilkan data deskriptif (Mukhtar, [2013](#)). Data-data pada artikel dan jurnal dikumpulkan dan kemudian dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut berdasarkan metode penelitian sejarah. Penelitian ini juga melakukan observasi di lapangan dengan mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat di sana. Observasi ini dilakukan di Kampung Cino, Kota Padang. Tepatnya di sekitaran Klenteng See Hin Kiong, Rumah Duka HBT (Himpunan Bersatu Teguh) dan Pasar Tanah Kongsu, yang mana ketiga lokasi ini berada di kawasan yang sama dengan jarak yang tidak terlalu jauh satu sama lain.

PEMBAHASAN

Masuknya Cina ke Padang dan Persentuhan Dua Budaya

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 200 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan terjadinya keragaman kebudayaan, suku bangsa, dan agama. Suku-suku bangsa yang mendiami Indonesia terdiri dari suku asli seperti Melayu, Minang, Jawa, Batak, Bugis dan lainnya. Sedangkan suku asing terdiri dari Arab, India, dan Cina (Reid, [2011](#)). Di antara suku bangsa asing yang mendiami negara Indonesia ini, etnik Cina mendapatkan perhatian yang cukup banyak daripada etnik yang lainnya. Hal ini karena peranan etnik Tionghoa yang ikut terlibat dalam segala sektor terutama di bidang ekonomi (Groeneveldt, [2009](#)).

Tidak diketahui pasti sejak kapan etnik Tionghoa ini datang dan menetap di Kota Padang. Salah satu yang pasti adalah mereka sudah menetap di Kota Padang sejak zaman Kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda menunjuk salah seorang cukong besar di bidang perdagangan yakni Lie Saay sebagai kapten. Lie Saay kemudian dikenal oleh masyarakat dengan julukan Kapten Cina. Melalui Lie Saay inilah Belanda melakukan ekspor rempah-rempah ke negerinya. Tidak mengherankan jika pada masa penjajahan, mereka sudah mendapatkan prioritas utama di segala bidang oleh pemerintahan Kolonial Belanda (Asnan, [2012](#)).

Secara geografis Cina lebih dekat ke wilayah Asia Tenggara, hal ini menyebabkan imigrasi penduduk Cina ratusan tahun lalu paling besar di wilayah ini. Dengan perahu, mereka menuju negeri baru dan melepaskan diri dari kesulitan hidup di negaranya. Sedangkan masalah minoritas non-pribumi telah dimulai sejak zaman Belanda. Masyarakat Cina ketika itu mendapat perlakuan rasialis, kerusuhan anti Cina pertama kali terjadi pada tahun 1740 di Batavia yang dilakukan oleh Belanda (Ricklefs, [2009](#)).

Sejak peristiwa tersebut, lahirlah aturan pemindahan berdasarkan ras dan agama. Orang-orang Cina diharuskan untuk tinggal di kampung-kampung Cina dan apabila ingin keluar pas-pasan. Sistem yang dikenal dengan *Wijken* dan *Passen Stelsel* (sistem pas dan pemukiman) yaitu sistem yang membatasi kebebasan bergerak secara fisik penduduk Cina. Kebijakan rasialis juga terjadi pada awal abad-19 M. Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing (Cina dan Arab), dan pribumi. Kebijakan kolonial dalam pembagian kelas penduduk menjadi embrio politik *Apartheid* yang berlaku di Afrika Selatan (Santoso, [2017](#)).

Setelah revolusi kemerdekaan, hubungan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi menjadi tegang. Keadaan ini terjadi pada masa Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Terpimpin. Politikus dan pihak militer terutama TNI Angkatan Darat yang anti komunis menaruh curiga adanya hubungan sebagian masyarakat Cina dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Republik Rakyat Cina. Pada tahun tersebut Cina telah dikuasai oleh Partai Komunis Cina (PKC), banyaknya masyarakat etnik Cina yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dan PKI serta hubungan PKI yang kerap membela kepentingan masyarakat Cina menjadi indikasinya (Utomo, [2017](#)).

Pemerintah Orde Baru yang lahir pasca Gerakan 30 September 1965 memutuskan cara menyelesaikan masalah Cina melalui proses asimilasi. Solusi ini dilakukan secara nasional, dengan tujuan agar masyarakat Cina terasimilasi dengan baik dan prasangka buruk berkurang (Afandi, [2017](#)). Di antara kebijakan tersebut adalah: pertama, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/1966 mengenai pergantian nama sehingga mulai saat itu masyarakat Cina harus menggunakan nama Indonesia. Kedua, Instruksi Presiden No. 14/1967 mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina yang berakibat setiap warga Cina harus masuk agama yang resmi diakui pemerintah dan pagelaran seni tari barongsai dilarang tampil di depan umum, dicabut oleh Keppres No. 6/2000 (Fitrya, [2013](#)).

Kampung Cina pada awalnya merupakan kantong-kantong pusat bisnis dan perdagangan awal Kota Padang, bahkan pada saat itu perdagangan dan perniagaan bersifat internasional, karena sungai Batang Arau menjadi tempat persinggahan kapal-kapal asing untuk bongkar muat barang. Sebuah pasar didirikan dekat Klenteng *See Hin Kiong*, pasar yang diberi nama pasar Tanah Kongsu ini didirikan di atas tanah milik Kapten Lie Maa Say dan dikelola oleh seorang Tionghoa bernama Poa Leng. Walaupun relatif baru, pasar Tanah Kongsu mampu menyaingi Pasar Mudik yang sebelumnya didirikan oleh orang Minang. Kemudian firma dagang Tionghoa yang bernama *Badu Ata & Co* mendirikan sebuah pasar yang bernama pasar Belakang Tangsi atau pasar *Badu Ata* (Erniwati, [2019](#)). Sampai menjelang awal abad ke-20 M, di kawasan Kampung Cina Padang terdapat empat buah pasar yang ramai dikunjungi, yaitu: Pasar Mudik, Pasar Tanah Kongsu, Pasar Belakang Tangsi dan Pasar Kampung Jawa.



Gambar 1: Suasana Pasar Kongsu Padang

Sumber: Dokumentasi Penulis

Menurut Geertz, etos kerja merupakan sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia etos kerja adalah aspek kognitif manusia yang bersifat edukatif dan menilai yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah bekerja dan berwirausaha dipandang sebagai keharusan hidup, sesuatu yang bersifat imperatif atau terkait dengan identitas diri yang bersifat sakral (Geertz, [1992](#)). Dalam hal ini identitas diri adalah sesuatu yang telah digariskan oleh religi. Selanjutnya dalam melihat etos kerja masyarakat Cina, selain dipengaruhi oleh nilai-nilai kepercayaan tradisional, nilai-nilai sosial dan kultural juga memberikan kontribusi kepada aspek manajerial.

Nilai budaya merupakan unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat. Seseorang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya. Dengan demikian nilai-nilai tersebut sangat luas, dapat ditemukan pada perilaku dalam kehidupan yang luas di alam semesta. Nilai budaya berfungsi untuk menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari nilai budaya dilakukan melalui pembudayaan atau pelebagaan. Dalam proses pelebagaan ini seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dengan adat, sistem norma dan peraturan. Proses ini dimulai sejak kecil, mulai dari lingkungan keluarga kemudian lingkungan di luar rumah, mula-mula dengan meniru berbagai tindakan. Hal ini menyebabkan nilai budaya sulit diganti dengan nilai budaya lain.

Dalam dua komunitas besar ini, melihat adanya kesamaan yang mendasar yaitu memiliki nilai budaya yang selalu dipertahankan di mana pun berada dan etos kerja yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan masyarakat Minang, nilai budaya merupakan suatu hal yang krusial dan bagi siapa yang tidak memedulikannya maka dianggap tidak beradab sehingga banyak sanksi yang diberikan oleh adat. Begitu juga dengan masyarakat Cina yang memegang kuat tradisinya sehingga mereka beranggapan bahwa melanggar hal tersebut dapat memperoleh kesusahan dalam hidup. Dalam bidang etos kerja kedua kelompok ini tidak diragukan lagi, karena sama-sama hidup di perantauan maka kesungguhan dalam berusaha merupakan hal utama mereka lakukan.

Kampung Cina Padang atau Pondok merupakan kawasan penting di Kota Padang. Warga Tionghoa baik kongsi Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT) dua kongsi warga keturunan Tionghoa yang ada di

Padang tetap mempertahankan tradisi mereka dan berbaur dengan etnik yang lain. Saat ini tercatat 10.000 warga keturunan Tionghoa yang ada di Padang. Menurut Erniwati, sejak awal masyarakat Tionghoa berbaur dengan warga lokal dan pada saat yang sama saling mempertahankan tradisi mereka. Hal ini tidak lepas dari sikap egaliter orang Minangkabau yang memberikan ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk hidup sesuai dengan kultur mereka. Harmonisasi yang tumbuh di antara warga Tionghoa dan etnik lainnya merupakan kekayaan yang sangat berharga (Erniwati, [2019](#)).

Kebudayaan Netralitas Masyarakat Secara Umum

Masyarakat Minang dikenal dengan kelihaiannya dalam berdagang dan prestasi-prestasi keilmuan. Di antara tiga ciri sosialnya yang dikenal secara umum, antara lain: (1) ketaatan pada agama Islam; (2) kesetiaan pada sistem keluarga yang bercorak matrilineal (nasab menurut ibu) dan; (3) kecenderungan untuk merantau (Naim, [1984](#)). Menurut legenda, masyarakat Minangkabau lahir di daerah pegunungan Minangkabau. Pada masa Iskandar Zulkarnain ketika bumi dilanda banjir besar, tiga orang putra Iskandar berlayar menuju Cina. Setelah bertengkar memperebutkan takhta peninggalan dari ayah mereka. Tiga bersaudara tersebut terpisah, di antaranya berlayar ke timur dan ke barat untuk menemukan Kerajaan Cina dan Anatolia, sedangkan *Maharajo Dirajo* mendarat di puncak merapi. Ketika banjir telah surut *Maharajo Dirajo* dan pengikutnya turun mencari daerah untuk bermukim, yaitu *Nagari Pariangan* Padang Panjang (Azrial, [1998](#)).

Sebagai sebuah etnik, keberadaan masyarakat Minang dapat dikatakan unik baik secara budaya, politik dan ekonomi. Dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, watak masyarakat Minang tempo dulu sering kali dilihat dari sisi negatif daripada positif. Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa orang Minang memiliki kesetiaan pada nenek moyangnya, keras kepala, tidak mudah melupakan penghinaan yang menimpa mereka dan berusaha secara diam-diam untuk membalas dendam, namun terhadap teguran dan hukuman mereka tidak akan dendam.

Pada umumnya masyarakat Minang ramah terhadap tamu terutama yang telah lama mereka kenal begitu juga terhadap tamu asing yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan tempat. Alam memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Minang, oleh sebab itu, mereka menyebutnya dengan alam Minangkabau, yaitu sebuah pengakuan terhadap universalitas adat Minangkabau. Alam adalah apa saja yang membentuk kehidupan semesta. Masyarakat Minang menganggap alam beserta unsur-unsurnya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air dan sebagainya tercipta dengan sifat, kedudukan dan fungsi yang sudah tertentu meskipun dengan tingkatan dan kadar yang berbeda (Sovia Firdaus et al., [2018](#)). Tugas manusia adalah mengamati dan mempelajari segala hal yang ada di alam untuk menjadikan hidup lebih baik. Maka masyarakat Minang memaknai kehidupannya dalam bentuk pantun, pepatah, petitih dan sebagainya dari kehidupan alam.

Di antara karakteristik masyarakat Minang, antara lain: Pertama, egaliter atau kesetaraan derajat, prinsip ini merupakan salah satu ciri khas masyarakat Minang, sedangkan munculnya petatah yang menyatakan "*penghulu ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah*" bukanlah berarti telah terjadi stratifikasi sosial di tanah Minang. Maksud dari petatah ini adalah adanya penghormatan bagi pemimpin. Kedua, tidak merasa rendah diri di hadapan orang lain, karakter ini telah lama berlangsung termasuk terhadap Belanda (Fatimah, [2012](#)). Ketiga, memiliki watak yang merdeka, Belanda ketika menguasai Minangkabau mengalami kesulitan karena watak masyarakat Minang yang selalu merdeka. Hal ini terlihat ketika mereka menghadapi kaum Paderi dan kaum adat. Keempat, orang Minang suka merantau, tujuan dari merantau adalah mencari ilmu, melarikan diri dari tekanan hidup di kampung halaman dan untuk melakukan perdagangan. Selama di kampung menurut adat, anak laki-laki tidak banyak berarti untuk diri dan masa depannya kecuali hanya untuk menjaga harta saudara perempuannya.

Dalam pergaulan hidup bersama masyarakat Minang, mereka melihat orang lain sebagai orang yang harus dihormati, harus diajak bermusyawarah dan dilindungi. Pendapat orang lain adalah musuh atau sasaran pemerasan sangat bertentangan dengan adat Minang. Pepatah "*duduk surang basampik-sampik, duduk basamo balapang-lapang*" mengisyaratkan tentang perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain.

Dalam budaya Minang dahulu sebenarnya telah didapati stratifikasi sosial dalam *nagari*, di antaranya: Pertama, stratifikasi berdasarkan ciri keturunan dan bukan prestasi. Selagi seseorang bukan merupakan *urang asa* (dan posisi penghulu tidak kosong dan dikosongkan) sulit baginya untuk menjadi penghulu. Walaupun seseorang tersebut memiliki harta yang banyak dan menerima harta gadai dari orang lain, keadaan ini tidak akan membantunya mendapatkan status yang lebih tinggi, kecuali *paruik* (kelompok keluarganya) memiliki pusaka dan tanah pemakaman (*pandam pakuburan*). Kedua, merupakan cara yang khas bagi *nagari-nagari* tertentu. Jika *urang asa* berpindah ke tempat lain dari negeri asal, mereka harus mencari suku yang mau menerima mereka sebagai *urang* datang di *nagari* yang baru. Akan tetapi mereka dapat mengangkat penghulu mereka sendiri setelah beberapa waktu jika mereka diberi hak untuk itu dan jika memenuhi (mengisi) adat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di antara karakter masyarakat Minang adalah dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat lain ketika hidup di rantau dan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hidup sebagai orang Minang dan mengayomi masyarakat pendatang dengan memberikan ruang dan kenyamanan kepada mereka sehingga di Sumatera Barat konflik dapat diminimalisir dengan baik, di antaranya dengan menggunakan adagium "*dima langik dijunjuang disitu bumi dipijak*", maksudnya adalah pentingnya usaha dalam menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar tempat kita berada.

Orang Cina dalam kehidupan sehari-hari telah ditata dalam kondisi yang patuh pada prinsip-prinsip isolasi tradisional sejak zaman leluhurnya dahulu. Kepatuhan tersebut hanya berlaku pada orang Cina saja dan tidak berlaku terhadap orang atau bangsa yang lain. Bangsa lain dianggap tidak benar, tidak bersih, tidak dapat dipercaya, harus diwaspadai, diteliti, dan sebagainya. Dasar dari prinsip-prinsip tersebut adalah tata tertib tradisional dan kuno.

Ruang Kehidupan Masyarakat yang Bertoleransi

Terbentuknya ruang pertemuan antar etnik maupun agama menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat heterogen. Dalam perjumpaannya yang membentuk ruang-ruang sosial akan ditemukan upaya membentuk integrasi di satu sisi dan tidak menutup kemungkinan terjadi benturan antar mereka di sisi lainnya. Upaya demikian tidak lepas dari penguasaan ruang oleh masing-masing kelompok. Fenomena ini dapat ditemui di kawasan Kampung Pondok. Sebagai kawasan pecinan, Kampung Pondok yang beretnik Cina dihadapkan dengan keberadaan etnik lain seperti etnik India yang saling bertentangan dan etnik Minang sebagai tuan rumah (*host population*). Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena adanya penguasaan ruang. Masing-masing dari mereka punya cara tertentu agar relasi dalam perjumpaannya dapat terjalin (Astuti & Widyanto, [1998](#)).

Melalui penelitian ini melihat ruang-ruang sosial yang terbentuk serta pergulatan identitas dalam perjumpaan antar etnik Minang, Cina dan India di Kampung Pondok. Teknik wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi dilakukan guna untuk mendapatkan data peristiwa-peristiwa serta kondisi sosial dalam perjumpaan antar etnik Minang, Cina dan India di Kampung Pondok. Teori produksi ruang dan identitas hibrid digunakan untuk mempertajam analisis dalam pembacaan ruang-ruang pada perjumpaan antar etnik tersebut.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan ruang-ruang sosial serta munculnya identitas akibat dari perjumpaan antar etnik Minang, Cina dan India di kawasan Kampung Pondok. Setidaknya terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian ini. Cina dan India sebagai penduduk pendatang memiliki ruang-ruang sosial tersendiri dalam membentuk konsolidasi solidaritas internal mereka. Minang sebagai penduduk pribumi ikut andil dalam menguasai ruang melalui kebijakan pemerintah. Sementara India yang memiliki kesamaan dengan Minang secara keyakinan menjadi modal dalam menguasai ruang yang diproduksi oleh etnik Cina. Kendatipun dikuasai oleh etnik Minang dan India, Cina memiliki strategi untuk mendapatkan *social equality* yaitu melalui identitas dan materi (Makmur et al., [2018](#)).

Terdapat ruang-ruang sosial yang diproduksi oleh Cina dan India sebagai konsolidasi sosial masing-masing mereka, di samping itu juga hadir ruang pertemuan di area pasar dan peristiwa kremasi. Ruang sosial yang dilakukan Cina ialah segala kegiatan yang mereka lakukan, ruang tersebut berupa kegiatan sosial yang diadakan oleh organisasi Himpunan Bersatu Teguh (HBT). Organisasi ini mengayomi seluruh permasalahan sosial yang dialami oleh etnik Cina. Kemudian ruang sosial yang dilakukan oleh etnik India yang berpusat di Masjid Muhammadiyah. Masjid ini sebagai sentral

kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Dalam hal ini kegiatan keagamaan diisi oleh *Jamaah Tabligh* yang mengadakan ceramah tiap hari Senin dan Kamis malam. Begitu juga dengan kegiatan kebudayaan seperti maulid dan *serak gulo* juga dilakukan di masjid ini. Sementara ruang sosial perjumpaan dapat ditemukan di area pasar dan peristiwa kremasi. Pasar sebagai pusat ekonomi menghadirkan ruang perjumpaan antar etnik Minang, Cina, dan India. Hal yang sama pada ruang peristiwa kremasi yang menyebabkan pertemuan dalam hal pergesekan antara etnik Cina dan etnik India. Ruang-ruang di atas menjadi praktik ke ruangan, yaitu segala praktik sosial yang dilakukan baik Minang, Cina maupun India. Praktik ke ruangan ini tidak hanya praktik sosial semata, namun juga menghadirkan ruang-ruang representasi di mana pengguna maupun pemilik ruang merasakan dan menghayati ruang yang ada. Ini artinya ruang-ruang yang hadir sudah dikonsepsi oleh masing-masing etnik dalam rangka pembenaran ruang oleh kelompok dominan.

SIMPULAN

Multikultural pada dasarnya telah lama diterapkan di Minangkabau, hal ini dapat dilihat dari interaksi berbagai budaya yang terdapat di Ranah Minang. Konsep multikultural adalah membangun rasa kebangsaan bersama di atas pluralisme namun tetap menghargai dan mengembangkan pluralisme masyarakat. Mesranya hubungan antara masyarakat Tionghoa dan Minang disebabkan oleh adanya keinginan dua belah pihak untuk meninggalkan politik identitas. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi sehingga muncul *statement* dari tokoh Tionghoa, “Kami dan masyarakat Minang adalah *badunsanak* (berkeluarga)”.

REFERENSI

- Afandi, A. (2017). Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Labuhan Haji dalam Hubungannya dengan Etnik Cina Pasca G 30 September 1965-1966. *Jurnal Historis*, 2(2), 25–35. <https://doi.org/10.31764/historis.v2i2.190>
- Alfirdaus, L. K., Hiariej, E., & Adeney-Risakotta, F. (2016). The Position of Minang-Chinese Relationship in the History Of Inter-Ethnic Groups Relations in Padang, West Sumatra. *Humaniora*, 28(1), 79–96. <https://doi.org/10.22146/JH.11506>
- Alkadrie, J. F., Hanifa, G. F., & Irawan, A. C. (2017). Dinamika Diaspora Subkultur Etnik Cina di Kota Singkawang. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 130–139. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.4>
- Asnan, G. (2012). *Dunia Maritim di Pantai Barat Sumatera*. Ombak.
- Astuti, R., & Widyanto, Y. S. (1998). *Budaya Masyarakat Perbatasan Hubungan Sosial Antargolongan Etnik yang Berbeda di Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Azrial, Y. (1998). *Budaya Alam Minangkabau*. Angkasa Raya.
- Cahyaningtiyas, I. A. (2020). Diskriminasi Terhadap Etnik Tionghoa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 3(2), 220–234. <https://doi.org/10.24176/kredo.v3i2.4379>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809–820. <https://doi.org/10.31078/jk1346>
- Deci, T. R. (2021). Etnik Tionghoa Kota Padang: Upaya Pelestarian Identitas Etnik Dalam Aspek Sosial-Budaya Tahun 1966-2002. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 10(2), 187–198. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i2.38984>
- Erniwati. (2019). Identitas Etnik Tionghoa Padang Masa Pemerintah Hindia Belanda. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 185–197. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.482>
- Fatimah, S. (2012). Gender dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.53>
- Fitrya, L. (2013). Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000. *Avatara*, 1(2), 159–166. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2326>
- Geertz, C. (1992). *Kebudayaan dan Agama* (F. B. Hardiman, Trans.). Kanisius.
- Groeneveldt, W. P. (2009). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. (2021). *Metodologi Sejarah* (M. Yahya, Ed.; cetakan V). Tiara Wacana.
- Kurniawan, B. (2016). Penggunaan Nama Barat oleh Etnik Tionghoa di Surabaya Western Name Usage by Ethnic Chinese in Surabaya. *Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.20473/lakon.v1i1.1911>

- Lutfiana, A. R., & Savitri, A. D. (2021). Adaptasi Fonologis pada Perubahan Nama Diri Etnik Tionghoa ke Nama Indonesia Mulai Tahun 1970—2019 sebagai Bentuk Pemertahanan Identitas Budaya Etnik Tionghoa. *Jurnal Sapala*, 8(2), 1–24. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/39911>
- Makmur, R., Kuswarno, E., Novianti, E., & Syafirah, N. A. (2018). Bahasa Minang Pondok dalam Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Tionghoa Kota Padang. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 133–146. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15302>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Reference.
- Naim, M. (1984). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau* (R. St.R.Tinggi & Antasari, Trans.; Cetakan II). Gadjah Mada University Press.
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, 1450-1680 M (Jilid II)* (R. Z. Leirissa & P. Soemitro, Trans.). Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2009). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (terj. Tim Serambi, Ed.). Serambi.
- Santoso, B. (2017). Bahasa dan Identitas Budaya. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 1(1), 44–49. <https://doi.org/10.14710/sabda.v1i1.13266>
- Sovia Firdaus, D. R., P.Lubis, D., Susanto, D., & Soetarto, E. (2018). Portrait of The Minangkabau Culture According to Hofstede's Six Cultural Dimensions. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23229>
- Utomo, S. P. (2017). Indonesia, Tiongkok dan Komunisme, 1949-1965. *Indonesian Perspective*, 2(1), 65–73. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i1.15539>